

PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS SDM

Risky Entina Ardianti¹, Yulia Rhoma Fitriyani², Ririn Fitriana³, Najwa Faradila⁴, Nina Farliana⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Semarang

Email: entinaardianti08@students.unnes.ac.id¹, yuliarf257@students.unnes.ac.id²,
ririnfitriana@students.unnes.ac.id³, najwafaradila11@students.unnes.ac.id⁴,
ninafarliana@mail.unnes.ac.id⁵

Abstrak

Pengangguran merupakan merupakan masalah besar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial di Indonesia. Ketidaksesuaian antara kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan industri merupakan salah satu penyebab utama tingkat angka pengangguran yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan. Data untuk penelitian ini diperoleh dari beberapa dokumen resmi, laporan kementerian dan data statistik yang berhubungan dengan dengan penelitian ini yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan menerapkan program pelatihan kerja pendidikan vokasi dan kolaborasi dengan sektor industri. Namun, masih ada beberapa masalah yang menghalangi dalam melaksanakan implementasi, seperti kekurangan pelatihan di beberapa daerah terpencil dan kurangnya keterlibatan industri dalam program peningkatan SDM.

Kata Kunci: Pengangguran, Kebijakan Pemerintah, Kualitas SDM, Pelatihan Kerja, Ketenagakerjaan.

Abstract

Unemployment is a major problem that impacts economic growth and social stability in Indonesia. The mismatch between workforce capabilities and industry needs is one of the main causes of high poverty rates. The purpose of this study is to analyze government policies to reduce poverty and improve the quality of human resources (HR). This study uses a qualitative descriptive approach with a policy study approach. Data for this study were obtained from several official documents, ministry reports and statistical data related to this study that are relevant. The results of the study indicate that the government has increased the competitiveness of the workforce by implementing vocational education job training programs and collaboration with the industrial sector. However, there are still several problems that hinder its implementation, such as the lack of training in several remote areas and the lack of industry involvement in HR development programs.

Keywords: *poverty, Government Policy, HR Quality, Job Training, Employment.*

PENDAHULUAN

Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi masalah pengangguran yang menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pengangguran tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Buswari et al., 2023). Tingginya angka pengangguran sering kali berkorelasi dengan meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pembangunan suatu negara (Dhifaf et al., 2025). Dampak pengangguran terhadap perekonomian Indonesia bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran, berkurangnya pendapatan nasional dari sektor pajak, dan tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meningkatnya pengangguran juga dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, yang berdampak pada lesunya sektor usaha dan investasi. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat pengangguran adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) (Imsar & Rambe, 2023), yang menghambat kemampuan tenaga kerja untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Kurangnya keterampilan dan pendidikan yang memadai membuat banyak pencari kerja kesulitan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja guna menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap bersaing di era globalisasi.

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi semakin meningkat. Namun, masih terdapat kesenjangan antara

keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dengan tuntutan industri, yang menyebabkan banyak lulusan sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai (Rahman & Rahman, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah guna mengatasi pengangguran secara efektif dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas SDM tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga pelatihan keterampilan berbasis industri yang relevan dengan perkembangan zaman (Septiana et al., 2023). Selain itu, pengembangan soft skills, seperti komunikasi, kerja sama tim, dan pemecahan masalah, juga sangat diperlukan agar tenaga kerja dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis. Adaptasi terhadap teknologi digital menjadi faktor penting, mengingat banyak industri kini mengandalkan otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan, sektor swasta, dan pemerintah menjadi faktor kunci dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas serta memastikan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

Pengaruh kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja telah dibahas dalam beberapa penelitian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, dan program pelatihan kerja dapat membantu menekan angka kemiskinan (Irma Juliana et al., 2023). Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, serta program pelatihan kerja dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini membantu meningkatkan

keterampilan tenaga kerja sehingga mereka lebih siap menghadapi persaingan di pasar kerja. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, terutama dalam hal daya jangkau, kesinambungan, serta adaptasi terhadap perubahan industri yang dinamis. Banyak program pelatihan yang belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti pekerja di sektor informal atau mereka yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, kesinambungan program sering kali terkendala oleh faktor anggaran dan kurangnya koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi dan pengembangan kebijakan yang lebih strategis dan berbasis data menjadi sangat penting agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih terarah dan fleksibel, kebijakan ketenagakerjaan dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan perubahan ekonomi dan teknologi di masa depan.

Melalui analisis terhadap kebijakan yang telah diterapkan pemerintah serta evaluasi efektivitasnya dalam menekan pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendukung keberhasilan kebijakan serta aspek yang masih perlu diperbaiki. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dalam implementasi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Pendekatan berbasis data dalam penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat guna bagi perumusan kebijakan di masa mendatang, sehingga langkah-langkah yang diambil menjadi lebih efektif. Kebijakan yang berhasil tidak hanya mampu mengurangi angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta daya saing Indonesia di pasar global.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan perkembangan teknologi. Dengan strategi yang adaptif, dunia kerja di Indonesia diharapkan mampu mengikuti tren global serta memanfaatkan peluang baru yang muncul. Melalui perbaikan kebijakan secara berkelanjutan, pasar tenaga kerja Indonesia dapat menjadi lebih kompetitif, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia (Kesumadewi & Aprilyani, 2024). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan memberikan rekomendasi strategis bagi kebijakan yang lebih baik di masa depan (Liani & Takari, 2024). Dengan analisis mendalam, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan kebijakan yang telah diterapkan. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih berbasis data dan kebutuhan pasar kerja yang sesungguhnya. Selain membantu pemerintah, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi sektor swasta dan lembaga pendidikan dalam mengadaptasi pendekatan mereka guna meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia (SHELEMO, 2023). Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun pasar tenaga kerja yang lebih inklusif, kompetitif, dan dinamis dalam menghadapi tantangan global.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi dalam perkembangan ilmu ekonomi dan ketenagakerjaan, tetapi juga dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif oleh pemerintah (Sasmiharti, 2023).

Kebijakan yang dirancang dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mohamad et al., 2025). Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu sektor swasta dalam memahami tren tenaga kerja, sehingga mereka dapat menyesuaikan strategi perekrutan dan pelatihan karyawan agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Lembaga pendidikan juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini dalam menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan perkembangan pasar kerja, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan industri.

Pemerintah dalam hal ini telah memainkan suatu peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional dan pembangunan sumber daya manusia demi mempersiapkan segala kebutuhannya dalam perkembangan teknologi yang selalu mengalami kemajuan serta pembaruan. Pemanfaatan teknologi dalam sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja juga menjadi salah satu aspek penting yang dapat meningkatkan kualitas SDM (Muhammad Jaelani & Sutono, 2023). Dengan adanya digitalisasi, pelatihan berbasis online dapat diperluas ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh program konvensional (Roosdhani et al., 2023). Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam kebijakan ketenagakerjaan harus diperkuat guna menciptakan tenaga kerja yang lebih fleksibel dan siap menghadapi tantangan era digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem tenaga kerja yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan, diharapkan kebijakan

ketenagakerjaan di Indonesia dapat lebih efektif dalam mengatasi permasalahan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM, sehingga Indonesia dapat bersaing di kancah global dengan tenaga kerja yang lebih unggul dan inovatif (Mangeka, 2024). Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Melalui kajian terhadap penelitian terdahulu dan sumber data sekunder lainnya, penelitian ini berupaya mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika pasar kerja dan kebutuhan industri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kebijakan yang bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengatasi permasalahan pengangguran. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menganalisis kebijakan yang telah diterapkan di Indonesia, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk kebijakan di masa mendatang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber resmi, termasuk laporan kementerian, dokumen kebijakan, jurnal akademik, serta data statistik yang relevan. Sumber-sumber ini dipilih dengan cermat guna memastikan validitas dan keakuratan data yang digunakan.

dalam analisis. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kebijakan ketenagakerjaan dari berbagai negara lain yang memiliki program sebanding sebagai bahan perbandingan. Dengan melakukan studi komparatif ini, diharapkan dapat ditemukan elemen kebijakan yang efektif dan dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari sumber-sumber terpercaya. Laporan pemerintah dan publikasi dari lembaga penelitian menjadi dasar utama dalam memahami kebijakan yang telah diterapkan serta hasil yang telah dicapai. Jurnal akademik dan artikel media resmi juga digunakan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Fokus utama dalam pengumpulan data ini mencakup kebijakan ketenagakerjaan, program peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta berbagai upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran. Selain itu, kebijakan dari negara lain yang memiliki keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan juga diteliti untuk memberikan wawasan tambahan dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap kinerja program yang ada, identifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta penilaian dampak program terhadap pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dalam tahap ini, penelitian juga akan menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri dan seberapa besar tantangan yang muncul akibat perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

Selain melakukan analisis terhadap kebijakan di Indonesia, penelitian ini juga

membandingkan kebijakan tenaga kerja di negara lain yang memiliki tantangan serupa. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menemukan elemen kebijakan yang mendukung keberhasilan suatu program serta aspek yang masih perlu diperbaiki agar lebih efektif dan efisien di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan wawasan yang lebih luas dalam merancang strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.

Sebagai langkah terakhir, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di masa depan. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang strategi yang lebih baik dan berkelanjutan guna mengatasi permasalahan pengangguran serta meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Dengan langkah-langkah yang tepat, angka pengangguran dapat ditekan secara signifikan, sementara kualitas tenaga kerja Indonesia semakin meningkat untuk memenuhi tuntutan zaman yang terus berkembang. Rekomendasi ini juga diharapkan dapat membantu sektor swasta dan lembaga pendidikan dalam menyusun strategi yang lebih baik untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan adanya kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis data, Indonesia diharapkan dapat menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih inklusif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangguran tetap menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Dampaknya tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat. Tingginya angka pengangguran berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan, memperlebar kesenjangan sosial, serta menurunkan daya beli masyarakat, yang pada

akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional (Nurahman, 2020). Selain itu, pengangguran yang tinggi juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan angka kriminalitas akibat tekanan ekonomi yang dialami individu tanpa pekerjaan. Berbagai faktor memengaruhi tingginya angka pengangguran di Indonesia, seperti ketidakseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan, serta perkembangan teknologi yang menggantikan peran manusia di beberapa sektor pekerjaan.

Di Indonesia, upaya untuk mengembangkan lapangan kerja terkait erat dengan upaya pemerintah untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat (Kesumadewi & Aprilyani, 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri, serta mendorong kewirausahaan sebagai alternatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan berkesinambungan, diharapkan angka pengangguran di Indonesia dapat berkurang, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pengangguran adalah ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri (Rahman & Rahman, 2021). Banyak lulusan perguruan tinggi maupun sekolah kejuruan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan

karena keahlian mereka tidak sejalan dengan tuntutan dunia kerja. Kurikulum pendidikan yang masih berfokus pada teori tanpa didukung keterampilan praktis yang relevan membuat lulusan kurang memiliki daya saing di pasar kerja. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pelatihan dan sertifikasi yang dapat meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri juga menjadi kendala bagi banyak tenaga kerja. Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi turut mengubah lanskap ketenagakerjaan dengan munculnya profesi baru yang membutuhkan keterampilan khusus. Jika tenaga kerja tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini, angka pengangguran berpotensi semakin meningkat.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor industri untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Program pelatihan vokasi dan magang di perusahaan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan keterampilan praktis lulusan (Azelia & Azzahra, 2024). Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional agar tenaga kerja Indonesia lebih siap bersaing di era globalisasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri dapat diminimalkan, sehingga peluang kerja bagi masyarakat semakin luas.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah untuk mengatasi masalah pengangguran melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan. pelatihan sangat dibutuhkan untuk dapatkan serta melahirkan sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan dunia kerja sesuai dengan kompetensinya (Muhammad Jaelani & Sutono, 2023). Salah satu inisiatif yang dijalankan adalah Kartu Prakerja, yang memberikan akses pelatihan bagi masyarakat agar lebih siap memasuki dunia kerja. Program Kartu Pra-kerja ini juga bisa

diartikan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan stimulus untuk perbaikan sumber daya manusia yang merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu (Yana, 2021). Selain itu, pemerintah juga mendorong pendidikan vokasi dan program berbasis industri guna memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Berbagai kerja sama telah dijalin dengan dunia usaha dan industri untuk menyediakan program magang serta pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja.

Di samping itu, pemerintah turut meningkatkan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendorong lebih banyak masyarakat menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha. Pemerintah selalu berupaya agar dapat memberikan dukungan lewat kebijakan-kebijakan terhadap pengembangan UMKM guna mengatasi berbagai masalah serta kendala yang dihadapi utara kemudian bantuan untuk modal usaha dalam bentuk pinjam lunak atau produktivitas UMKM semakin berkembang dan pembeli jadi dari bank secara bantuan dana CSR BUMN (Umkm et al., 2024). Program bantuan modal dan pendampingan bisnis bagi pelaku UMKM terus diperkuat agar daya saing serta keberlanjutan usaha mereka semakin meningkat. Selain sektor UMKM, pengembangan industri kreatif dan ekonomi digital juga mendapat perhatian khusus karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. Upaya lain yang dilakukan mencakup pemberian insentif bagi perusahaan yang membuka lebih banyak lapangan pekerjaan serta peningkatan investasi di berbagai sektor strategis. Dengan berbagai kebijakan ini, diharapkan angka pengangguran dapat terus ditekan, sementara masyarakat memiliki lebih banyak peluang untuk bekerja atau berwirausaha. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, pemerintah berupaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang

lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah akses terhadap pelatihan yang masih terbatas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur pendukung yang memadai. Selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya peningkatan keterampilan dan enggan mengikuti program pelatihan yang disediakan (Wilem Reinhart Ridolof Pomeo & Eko Winarti, 2024). Faktor lain yang turut menjadi hambatan adalah belum optimalnya evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan yang telah berjalan. Banyak pelatihan yang masih bersifat umum dan tidak spesifik dalam memenuhi kebutuhan industri, sehingga lulusan program tersebut tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Selain itu, ketimpangan akses internet dan teknologi juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis digital, yang saat ini banyak digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Kurangnya dukungan dalam hal fasilitas serta pendampingan bagi peserta pelatihan di beberapa daerah membuat efektivitas program ini menjadi kurang maksimal. Di sisi lain, kolaborasi antara dunia usaha dan lembaga pendidikan masih perlu diperkuat agar program yang disusun benar-benar relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap program yang telah dijalankan guna memastikan bahwa pelatihan yang diberikan benar-benar meningkatkan peluang kerja bagi peserta. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya peningkatan keterampilan harus lebih digencarkan agar semakin banyak masyarakat yang terdorong untuk mengikuti program pelatihan. Dengan mengatasi berbagai tantangan ini, diharapkan kebijakan yang telah diterapkan dapat berjalan lebih

efektif dan memberikan dampak nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan keterlibatan dunia industri dalam pengembangan kurikulum pendidikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Perguruan tinggi dan sekolah kejuruan perlu bekerja sama dengan perusahaan dalam menyusun kurikulum berbasis industri yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga memberikan pengalaman praktis guna meningkatkan kesiapan kerja lulusan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperluas akses terhadap pelatihan keterampilan dengan membangun infrastruktur pendukung di daerah terpencil serta menyediakan program pelatihan daring yang lebih mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Selain meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, pemerintah juga dapat mendorong program sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional. Sertifikasi ini akan membantu tenaga kerja memiliki standar keahlian yang lebih jelas, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Program insentif bagi perusahaan yang aktif dalam memberikan pelatihan atau magang bagi calon tenaga kerja juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, penguatan ekosistem kewirausahaan juga menjadi strategi penting dalam mengurangi pengangguran. Pemerintah dapat menyediakan bantuan modal, bimbingan bisnis, serta akses pasar bagi pelaku UMKM dan startup agar mereka dapat berkembang lebih pesat. Dengan berbagai strategi yang terintegrasi, diharapkan angka pengangguran dapat terus menurun, sementara kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin meningkat.

Tidak hanya pemerintah, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan tenaga kerja. Perusahaan dapat berkontribusi dengan menyediakan program magang atau pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja sebelum mereka direkrut secara resmi. Melalui program ini, peserta dapat memperoleh pengalaman langsung di dunia industri serta meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, kolaborasi antara perusahaan dan institusi pendidikan dalam memberikan pelatihan berbasis industri akan memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah dapat memberikan insentif berupa keringanan pajak atau subsidi bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam program pelatihan tenaga kerja (Basuki et al., 2023). Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk terlibat aktif dalam menciptakan tenaga kerja yang lebih siap dan kompeten. Selain itu, pemerintah juga dapat memfasilitasi kerja sama antara perusahaan dan lembaga pelatihan dalam pengembangan kurikulum yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan industri. Di samping itu, sektor swasta juga dapat berkontribusi dalam pengembangan kewirausahaan dengan menyediakan mentoring, akses permodalan, serta peluang kerja bagi wirausahawan baru. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan, diharapkan tantangan dalam ketenagakerjaan dapat diatasi secara lebih efektif, sehingga angka pengangguran di Indonesia dapat terus menurun dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Dengan demikian, lebih banyak tenaga kerja akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk terus mengembangkan keterampilan juga harus ditingkatkan. Tidak cukup hanya

mengandalkan pemerintah, individu perlu proaktif dalam mencari peluang untuk meningkatkan kemampuan mereka agar lebih kompetitif di pasar kerja. Platform pembelajaran daring serta berbagai program pelatihan yang telah tersedia harus dimanfaatkan secara optimal agar masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Selain itu, komunitas dan organisasi sosial juga dapat berperan dalam menyediakan pelatihan gratis bagi kelompok masyarakat kurang mampu, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Dengan adanya inisiatif dari berbagai pihak, diharapkan kesenjangan dalam akses terhadap pelatihan dan pendidikan keterampilan dapat dikurangi. Masyarakat yang lebih terampil dan berdaya saing akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru. Pada akhirnya, pengurangan angka pengangguran memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, serta masyarakat itu sendiri. Dengan komitmen bersama dan langkah-langkah yang tepat, diharapkan tantangan ketenagakerjaan dapat diatasi secara efektif, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia terus meningkat.

Dalam upaya mengurangi angka pengangguran, pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan wirausaha sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja. Dengan mendorong masyarakat untuk menjadi wirausahawan, mereka tidak hanya membuka peluang kerja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dukungan pemerintah dapat berupa akses pembiayaan, bantuan modal, serta pelatihan kewirausahaan agar semakin banyak masyarakat yang tertarik dan mampu memulai usaha sendiri. Selain itu, kemudahan dalam perizinan usaha dan regulasi yang mendukung pertumbuhan

UMKM menjadi faktor penting dalam meningkatkan semangat berwirausaha. Banyak calon pengusaha menghadapi kendala dalam memulai bisnis mereka akibat prosedur yang rumit dan keterbatasan akses terhadap informasi.

Oleh karena itu, digitalisasi layanan perizinan serta pendampingan dalam pengelolaan usaha dapat membantu mempercepat pertumbuhan sektor kewirausahaan dan mengurangi hambatan administratif. Pemerintah juga dapat menjalin kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk menyediakan program kredit usaha berbunga rendah atau skema pembiayaan yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha pemula. Dengan dukungan yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan semakin banyak masyarakat yang berani berwirausaha dan berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru, sehingga angka pengangguran di Indonesia dapat terus menurun dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan benar-benar memberikan dampak maksimal, evaluasi secara berkala harus dilakukan. Pemerintah perlu terus meninjau efektivitas program pelatihan dan memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan benar-benar relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan harus terus diperkuat agar kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan data dan masukan dari peserta pelatihan serta perusahaan untuk mengevaluasi sejauh mana program yang dijalankan berhasil meningkatkan peluang kerja bagi tenaga kerja. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan industri, maka kurikulum pelatihan perlu segera disesuaikan agar lebih relevan dan aplikatif. Di samping itu, transparansi dalam pelaksanaan program juga harus ditingkatkan

agar setiap kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan evaluasi yang berkelanjutan serta sinergi dari berbagai pihak, diharapkan program yang telah dirancang dapat benar-benar mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Secara keseluruhan, pengangguran di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi terintegrasi dari berbagai pihak. Pemerintah, sektor industri, dunia pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan tenaga kerja yang lebih kompetitif. Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, perluasan akses pelatihan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan keterampilan diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Selain itu, dukungan terhadap kewirausahaan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan peluang kerja baru. Pemerintah dan sektor swasta dapat berkolaborasi dalam menyediakan akses pembiayaan, mentoring, serta pendampingan usaha bagi masyarakat yang ingin memulai bisnis sendiri. Dengan berkembangnya sektor UMKM dan ekonomi kreatif, lapangan pekerjaan akan semakin terbuka luas bagi berbagai kelompok masyarakat. Jika langkah-langkah ini dilakukan secara berkelanjutan, Indonesia akan memiliki tenaga kerja yang lebih siap menghadapi persaingan global dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Dengan strategi yang terarah serta komitmen bersama dari semua pihak, tantangan dalam ketenagakerjaan dapat diatasi, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat dan Indonesia dapat menjadi negara dengan perekonomian yang lebih maju dan stabil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat beragam, termasuk pelatihan kerja, program vokasi, dan kerja sama dengan industri. Berbagai program telah dirancang untuk membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar lebih selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Salah satu tantangan utama adalah akses yang tidak merata ke pelatihan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, serta kurangnya keterlibatan dunia industri dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi yang berkelanjutan untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika ekonomi dan teknologi.

Selain itu, kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, sektor industri, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap bersaing. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengembangan keterampilan juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih proaktif dalam meningkatkan daya saing individu. Dengan langkah-langkah yang tepat dan kolaborasi yang kuat, diharapkan angka pengangguran di Indonesia dapat ditekan, sementara kualitas SDM semakin meningkat dan lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja global. Jika seluruh pihak berperan aktif dalam mewujudkan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif, maka Indonesia dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan simpulan penelitian ini, disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas program pelatihan kerja dan vokasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan industri. Penelitian juga dapat

memperkuat strategi untuk meningkatkan akses pelatihan bagi masyarakat di daerah terpencil serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, sektor industri, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten. Selain itu, penting untuk meneliti cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan keterampilan agar mereka lebih proaktif dalam menghadapi persaingan di dunia kerja yang semakin kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azelia, A. A., & Azzahra, H. (2024). Analisis Efektivitas Implementasi Program MSIB Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Tenaga Kerja Perguruan Tinggi Indonesia. *Inovasi Makro Ekonomi*, 6(3), 183–195.
- Basuki, I., Studi, P., Sipil, T., Atma, U., & Yogyakarta, J. (2023). *TANTANGAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI DALAM INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045*. 44, 24–26.
- Buswari, M., Puspaningtyas, M., Priyanto, E., Drajat, M., Ulfa, N., & Larasati, V. (2023). *Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pengangguran, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Sebuah Studi Empiris dengan Pendekatan Regresi*. 1(2), 29–38.
- Dhifaf, V., Kasih, A., & Kunci, K. (2025). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera*. 8(1), 276–286.
- Imsar, & Rambe, R. A. (2023). Pengaruh Ekonomi Pembangunan Terhadap Sumber Daya Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(2), 264–268.
- Irma Juliana, Nindi Laili Safitri, & Wulan Fadillah. (2023). *Dinamika Ekonomi Pembangunan Indonesia: Mengungkap Faktor-Faktor Kualitatif yang Mendorong Pertumbuhan*. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 1(2), 01–13. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i2.436>
- Kesumadewi, E., & Aprilyani, A. (2024). Mengatasi Pengangguran Melalui Peningkatan Kewirausahaan dengan Program Tenaga Kerja Mandiri. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–15. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.360>
- Liani, Y., & Takari, D. (2024). *Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022*. 5(11).
- Mangeka, T. A. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kabupaten Berau. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi ...*, 7(1), 77–95. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6821>
- Mohamad, S., Saleh, G. S., & Umuri, H. (2025). *Implementasi Program UMKM dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Padengo Kabupaten Pohuwato*. *Implementation of the UMKM Program in Poverty Alleviation di Desa Padengo Kabupaten Pohuwato*. 03, 117–140.
- Muhammad Jaelani, & Sutono. (2023). Implementasi Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Balai Latihan Kerja (Blk) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Dalam Upaya Mengurangi Pengangguran. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 138–149. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1825>
- Nurahman, A. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistrati>

- e.v2i1.2559
- Rahman, D., & Rahman, K. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Studi Program Kartu Prakerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(1), 39–53. [https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7\(1\).9717](https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7(1).9717)
- Roosdhani, M. R., Ali, A., & Sholahuddin, M. (2023). Pemberdayaan Dan Pendampingan E-Commerce Umkm Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. *Jurnal AbdiMas Nusa Mandiri*, 5(2), 91–96. <https://doi.org/10.33480/abdimas.v5i2.4649>
- Sasmiharti, J. (2023). Manfaat Sosial Ekonomi Dari Pendidikan Gratis di Masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(1), 57–62. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/16954>
- Septiana, S., Wicaksono, R. N., Saputri, A. W., Fawwazillah, N. A., & Anshori, M. I. (2023). Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Masa Yang Mendatang. *Student Research Journal*, 1(5), 447–465.
- SHELEMO, A. A. (2023). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Umkm, P., Bantuan, P., Pahlawan, P., & Probolinggo, N. K. (2024). 3 1,2,3. *18(1978)*, 3331–3342.
- Wilem Reinhart Ridolof Pomeo, & Eko Winarti. (2024). Dinamika Implementasi Kebijakan Penempatan TenagaKesehatan Di Daerah Terpencil: Tantangan DanRealitas Lapangan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5, 2309–2329.
- Yana, S. D. (2021). Efektifitas Program Kartu Prakerja Dalam Membangun Sumberdaya Manusia di Tengah Pandemi. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 12–21.